

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan III 2024, Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi sebesar -0,21% (mtm). Deflasi yang terjadi tidak sedalam deflasi yang terjadi pada bulan lalu sebesar -0,03% (mtm) namun lebih dalam jika dibandingkan deflasi nasional sebesar -0,21% (mtm). Dengan pencapaian tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 2,09% (yoy) dan secara kumulatif mencapai 1,02% (ytd). Deflasi Jawa Barat pada bulan September 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman & tembakau serta kelompok transportasi. Inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking* serta sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi/Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun andil deflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar -0,24% (mtm). Andil deflasi dari kelompok ini disumbang oleh komoditas cabai rawit sebesar -0,08% (mtm), cabai merah sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar -0,06% (mtm), dan telur ayam ras sebesar -0,04% (mtm). Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit terjadi karena stok di pasaran cukup melimpah. **Di sisi lain, kelompok Transportasi juga tercatat memberikan andil deflasi yang bersumber dari komoditas bensin sebesar -0,04% (mtm).** Komoditas bensin masih berpotensi memberikan andil deflasi bulan Oktober bersama dengan komoditas daging ayam ras dan cabai merah.

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami deflasi. Deflasi bulanan terdalam terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Subang, dengan komoditas utama penyumbang deflasi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Sebaliknya, deflasi terendah berada di Kota Depok dengan komoditas utama penyumbang deflasi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Berdasarkan pencapaian inflasi secara *year-to-date* dapat kami sampaikan bahwa Kota Depok dan Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan ruang sisa terendah untuk mencapai target RKPD 2024 sebesar 2,5% sehingga perlu adanya upaya pengendalian inflasi utamanya terkait pengendalian inflasi pangan yang lebih massif dan intensif di kedua kota tersebut. Di sisi lain, Kab. Subang selama ini telah memiliki inflasi yang rendah dan bahkan secara tahun berjalan mencatatkan deflasi (-0,01%, ytd). Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat berlimpahnya pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-III 2024 yaitu:

1. Harga beras mengalami kenaikan cukup tinggi pada awal tahun, mengalami penurunan

saat terjadi panen raya.

2. PT Pertamina menurunkan kembali harga bensin dan solar non subsidi TMT 2 September 2024.
 3. Rata-rata harga emas dan harga kiopi di pasar internasional mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir
 4. Produksi bawang merah menunjukkan tren penurunan sejak bulan Juli-Agustus 2024 dan diperkirakan mulai meningkat pada bulan September 2024.
 5. Penurunan produksi aneka cabai sejak Juni 2024 disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergeseran jadwal tanam, kurangnya ketersediaan air, cuaca panas dan serangan OPT.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb:

1. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota ke Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 5 kali selama Triwulan III;
3. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota setiap hari yang disajikan dalam SILINDA JABAR;
4. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR);
5. Pengembangan Aplikasi SILINDA JABAR;
6. Pengelolaan stok beras dan komoditas lain oleh BULOG bulan September 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beras: 169.888.747 kg
 - b. Gula Pasir: 354.384 kg
 - c. Daging Sapi: 2.490 kg
 - d. Daging Kerbau: 87 kg
 - e. Minyak Goreng: 100.368 L
 - f. Tepung Terigu: 58.884 kg
7. Pengadaan beras dalam negeri per September 2024 sebesar 212.948,34 ton;
8. Penyaluran bantuan pangan oleh BULOG sebanyak 44.556.010 Kg per 31 Agustus 2024;
9. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh sampai dengan Bulan September 2024 sebanyak 79.245.786 Kg;
10. Pengiriman beras SPHP melalui ritel modern per September 2024 sebanyak 2.760.825 Kg;
11. Pengadaan Cadangan Pangan di tahun 2024 sebanyak 833 ton yang terdiri: Beras 738 ton, Daging 25 Ton, Telur 20 Ton, Minyak 25 Ton, Gula 25 Ton oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
12. Pemberian akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan di bawah harga pasar melalui Mobil Paling Jawara sebanyak 49 kali di Tahun 2024;
13. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 416 kali sampai dengan September 2024;
14. Fasilitasi distribusi komoditas pangan pokok strategis sebanyak 1.508.500 Kg sampai dengan September 2024;
15. Fasilitasi bantuan pemerintah berupa pemberian benih unggul bersertifikat telah

dilaksanakan pada lahan seluas 321.365 Ha baik melalui DIPA Pusat maupun DIPA TP Provinsi;

16. Pengembangan Varietas Padi untuk Adaptasi Perubahan Iklim;
17. Penyerahan bantuan pompa air sebanyak 7.033 unit, sudah serah terima 100% dan sudah dimanfaatkan sebanyak 6.033 unit (85,78%);
18. Pengembangan Kawasan Cabai & Bawang Merah melalui Kemitraan Champion;
19. Pengamanan produksi cabai dan bawang merah Jawa Barat melalui kegiatan Fasilitasi Nursery, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian;
20. Penerapan Teknologi Irigasi Efisien dan Teknik Konservasi Air;
21. Penyebaran ternak ke kelompok peternak;
22. Pengembangan hijauan pakan ternak (Gerbang Patas);
23. Penyebaran mutu bibit/benih ternak berkualitas;
24. Peningkatan kegiatan *rearing* sapi perah;
25. Peningkatan dan pengembangan pelestarian SDG hewan;
26. Pengawasan dan peredaran mutu pakan dan bahan pakan;
27. Pengawasan dan monitoring ketersediaan dan kebutuhan (daging telur susu);
28. Fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
29. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular strategis;
30. Pengawasan dan monitoring NKV produk peternakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah, dan cabai masih rentan dalam menghadapi anomali maupun gangguan cuaca;
2. Penguatan dan pemutakhiran data ketersediaan dan kebutuhan serta data harga komoditas pangan strategis;
3. Pengelolaan stok belum optimal yang menyebabkan kekurangan saat bukan musim panen;
4. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, seperti bawang putih, jagung, gandum, gula pasir, dan lain-lain;
5. Tingginya hasil panen yang hilang dalam rantai pasok pangan;
6. Turunnya harga beberapa komoditas pangan menyebabkan deflasi pada akhir periode Triwulan-III sehingga berdampak pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP);
7. Monitoring program/kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-III 2024 di antaranya :

1. Optimalisasi peran BUMD dalam ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis;
2. Memanfaatkan data P3KE untuk menentukan titik-titik lokasi pelaksanaan GPM/Pasar Tani dan kegiatan sejenisnya;
3. Mengembangkan benih komoditas pangan impor agar dapat dikembangkan di Jawa Barat dan pengembangan komoditas lokal yang dapat menggantikan komoditas pangan

impor tersebut, seperti sorgum;

4. Antisipasi ketersediaan pasokan pangan dan energi menjelang Pilkada serentak dan HBKN Nataru serta adanya perubahan iklim pada Triwulan-IV;
5. Memperkuat sistem bank pangan maupun sistem/inovasi yang membantu dalam pencegahan dan pengurangan *food loss* dan *food waste* di setiap titik rantai pasok pangan;
6. Melaksanakan *capacity building* untuk PIC Kabupaten/Kota aplikasi pemantauan harga Jawa Barat (SILINDA JABAR).